

TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PARTAI POLITIK

Hisny Fajrussalam¹, Annisa Apriliyani², Alya Dewi Aprianti³, Fariza Nur Aulia⁴,
Lusvinaningtyas⁵

Prodi PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia

hfajrussalam@upi.edu, annisaapril@upi.edu, alyadewiaprnt@upi.edu, Farizaaulia@upi.edu,

Lusvinaningtyas@upi.edu

Abstrak

Partai politik merupakan wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama sehingga pemikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan, sedangkan secara umum partai politik dapat dikatakan adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Fungsi partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa. Partai politik Islam merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses politik karena partai politik Islam lahir dari mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Rumusan masalah-nya adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap partai Islam? Tujuannya adalah untuk mengetahui Mengetahui sikap masyarakat mendukung atau memihak (*favorable*) maupun tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) terhadap partai Islam. Dalam sebuah data ditemukan bahwa Sikap masyarakat dari jumlah sampel 85 responden dihasilkan masyarakat yang bersikap positif terhadap partai politik Islam sebesar 48%, masyarakat yang bersikap biasa sebesar 36%, sedangkan yang bersikap negatif terhadap partai politik Islam sebesar 15% yang tersebar dalam 4 dimensi yang diujikan antara lain dimensi tokoh/kader, ideologi/platfrom, program kerja, dan citra partai

Kata kunci : Partai politik; Masyarakat Islam; politik

Abstract

*Political parties are organizational platforms, they can unite people who have the same thoughts so that their thoughts and orientations can be consolidated, while in general a political party can be said to be an organized group whose members have the same orientation, values and ideals. The function of political parties is as a liaison between the people and the rulers. Islamic political parties are a factor that needs to be taken into account in the political process because Islamic political parties are born from the majority of Indonesian people who are Muslim. The formulation of the problem is what is the attitude of the community towards Islamic parties? The aim is to find out the attitude of the community to support or favor (*favorable*) or not support or not take sides (*unfavorable*) against Islamic parties. In one data, it was found that public attitudes from a sample of 85 respondents resulted in people who had a positive attitude towards Islamic political parties by*

Diserahkan: 09-09-2022 Disetujui: 21-10-2022. Dipublikasikan: 03-11-2022

48%, people who behaved normally by 36%, while those who had a negative attitude towards Islamic political parties were 15% spread over 4 different dimensions. tested include the dimensions of figures/cadres, ideology/platforms, work programs, and party image.

Keywords: *political parties; Islamic society; politics*

PENDAHULUAN

Porsi terbesar dari 1,5 miliar warga Islam dunia bukanlah bangsa Arab, melainkan Asia dan Afrika. Hanya sekitar 1/5 yang merupakan bangsa Arab. Komunitas Islam terbesar hidup di Indonesia, Banglades, Pakistan, India, dan Nigeria bukan dari Arab Saudi, Mesir ataupun Iran. Indonesia sendiri menempati posisi pertama dalam populasi terbesar di dunia. Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia itu sendiri partai politik berasaskan Islam selalu kalah dalam pertarungan politik di Indonesia sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam sejarah pemilu demokratis Indonesia, kekuatan partai-partai berasas Islam tidak pernah menjadi kekuatan mayoritas walaupun hampir 90% pemilih Indonesia beragama Islam. Lebih mendasar lagi, hasil pemilu di Indonesia merupakan sinyal yang jelas bahwa mayoritas Islam sudah tidak lagi menganggap penting simbol-simbol Islam dalam politik dan lebih pada substansi, jika memang demikian ini mungkin adanya pergeseran budaya politik dan partisipasi politik dalam Masyarakat Muslim itu sendiri.

Salah satu dari sejumlah istilah yang dapat mempunyai banyak arti sehingga istilah tersebut pada akhirnya kehilangan kegunaannya bisa disebut juga sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik diterapkan kepada aktifitas orang dari semua tingkat sistem politik. Di Negara-negara yang menganut paham demokrasi gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak menentukan siapa-siapa yang menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksana kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi partai politik. fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi. Selain dari itu partai politik merupakan tiang dari demokrasi di masa modern, demokrasi dengan sistem keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik harus didelegasikan dalam bentuk pembentukan partai politik.

Efisiensi kerja demokrasi dibutuhkan agar aspirasi masyarakat benar-benar tersalurkan. Wahana efisiensi kerja demokrasi dalam masyarakat modern yang plural merupakan arti dari pada partai politik. Gelombang demokrasi yang sudah mulai surut di dunia ketiga, mulai menaik kembali. Di beberapa negara seperti Filipina, Taiwan, dan Thailand, gaya pemerintahan otoriter, di mana kontrol atas alat kekerasan menjadi penyangga utama kekuasaan mutlak oleh satu orang atau kelompok, telah diganti menjadi demokrasi di mana pemerintah dipilih masyarakat dalam pemilihan bebas.

Dengan partisipasi politik kita mengacu pada semua aktivitas yang sah oleh semua warga negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk mempengaruhi pejabat pemerintah atau tindakan-tindakan yang mereka ambil. Definisi tersebut masih merupakan garis besar, tapi sudah cukup membatasi bidang kepentingan kita. Istilah itu menunjukkan bahwa pada dasarnya kita berkepentingan dalam berpartisipasi politik. Berhasil tidaknya demokrasi dalam mentransformasikan sikap dan perilaku masyarakat dapat merupakan suatu test terhadap seberapa jauh kekuatan penjelas dari teori kebudayaan politik. teori kebudayaan politik melekat beberapa arti penting pada sikap politik, keyakinan politik, nilai dan emosi-emosi dalam menjelaskan fenomena politik. Perkembangan atau dinamika kebudayaan selama 20 tahun terlahir ini, baik dalam tataran ideologi, (seperti ungkapan retorik, kebudayaan nasional, kebudayaan daerah atau kepribadian bangsa) maupun pada tataran berbagai kegiatan budaya (empiris), tentulah tidak dapat dipisahkan atau dipahami lepas dari pemahaman terhadap setting sosial politik yang berlangsung pada kurun waktu tersebut.

Nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintahan itu merupakan istilah dari budaya politik. Akan tetapi budaya politik tertentu tidak dapat dihubungkan secara kuat dengan sistem politik tertentu. Budaya politik ini sangat luas lingkungannya seperti halnya kultur terutama jika subkultur juga di bahas. Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki kita dapat menggolongkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintah negaranya. budaya ditempatkan dan dipahami sebagai setumpuk aturan tidak tertulis, Namun adanya pergeseran budaya politik dipercaya sebagai salah satu faktor kenapa partai Islam kalah.

Berdirinya partai-partai berasaskan Islam di Indonesia dilihat sebagai perkembangan politik itu sendiri di Indonesia pada masa bersangkutan yang akan memungkinkan untuk melakukan penilaian tentang kedudukan partai, kekuatan dan kelemahan, disamping melihat para pemimpinnya serta para strukturnya itu sendiri. Fenomena kekalahan partai berasaskan Islam di Indonesia meskipun mayoritas masyarakat Indonesia Islam memunculkan spekulasi adanya partisipasi Masyarakat Muslim yang tidak selalu kearah partai berasaskan Islam, hal ini tentu mengundang wacana desakralisasi partai berasaskan Islam itu sendiri. Desakralisasi partai Islam ini, sejatinya merupakan proyek pengembalian makna yang sakral sebagai sakral dan yang profan. Partai berasaskan Islam yang tadinya dianggap sakral kini hendak "didesakralisasikan" alias di kembalikan di wilayah profan. Itulah yang dalam wacana sosiologi diistilahkan dengan makna "sekularisasi", yang secara epistemologis dimaksudkan sebagai "devaluasi radikal" atau "detimologisasi" atas apa saja yang bertentangan dengan ide tauhid. Berpijak pada konsep demikian, partai berasaskan Islam itu bukan hal esensial dan substantif, serta sama sekali tidak terkait dengan ke-Islaman seseorang untuk memilih partai berasaskan Islam tertentu. Itulah sebabnya desakralisasi partai berasaskan Islam ini lebih dimaksudkan untuk membebaskan umat Islam dari politik yang bersifat partisan. Malahan, lebih dari itu proyek ini mempunyai arti penting bagi pembebasan umat dari stigma dan beban sejarah yang tidak kondusif bagi pengembangan umat Islam. Sebab, ketika Islam tersubordinasikan ke dalam partai

yang cenderung mengutamakan kepentingan kelompok partai dengan berbagai aturan verbal, maka makna Islam menjadi sempit dan cenderung eksklusif. Sehingga mudah terjebak pada penilaian bahwa umat Islam yang tidak menjadi anggota atau pengikut partai berasaskan Islam, dianggap sebagai “kurang Islami. Dalam masyarakat pluralis terutama dalam konstitusi parlementer, partai dibentuk atas dasar keragaman kepentingan.

Paham Marxisme Lenisme mendefinisikan partai sebagai organisasi politik di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kelas untuk mewakili berbagai kepentingan kelompok. Di permukaan kehadiran partai-partai berasaskan Islam memberikan kesan pengingkaran pada logika transformasi pemikiran dan praktek politik Islam yang telah berlangsung selama dua dasawarsa lebih ini. Menonjolnya bahan dan simbol politik berasaskan Islam merupakan indikasi utama kalau bukan satu-satunya. Dari pengalaman masa lalu dengan seluruh implikasinya merupakan sesuatu yang tergesa-gesa tetapi jauh panggang dari api. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa masyarakat Indonesia telah berubah secara cukup berarti. Mobilitas sosial dalam bentuknya yang luas yang di alami komunitas Islam merupakan faktor penting dalam perjalanan mereka selama dua dasawarsa lebih ini.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan kajian untuk memahami tingkat kepercayaan masyarakat muslim terhadap partai politik. Agar dapat mengetahui permasalahan serta jalan keluar dari penelitian ini, maka artikel penulisan ini di rancang dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian dengan menggunakan metode literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku-buku, jurnal, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah dalam kajian artikel ini. Dalam melakukan penelaahan di temukan informasi-informasi yang relevan dengan kajian ini lalu di himpun dari sumber Pustaka. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

Dibutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang optimal. Penelitian studi literatur membutuhkan analisis yang matang dan mendalam agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian penelitian dengan studi literatur juga merupakan sebuah penelitian dan dapat dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Variabel pada penelitian studi literatur bersifat tidak baku. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam oleh penulis. Data-data yang diperoleh dituangkan ke dalam sub bab-sub bab sehingga menjawab rumusan masalah penelitian. Dari penulisan artikel ini dapat diuraikan tujuan yang ingin di hasilkan yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai tingkat kepercayaan masyarakat muslim terhadap partai politik. Dari tujuan pembuatan artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat muslim terhadap partai politik. Berdasarkan uraian di atas, dalam melakukan penulisan artikel ini di harapkan dapat menghasilkan temuan baru dari hasil proses penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika kita lihat dari hasil penelitian yang menggunakan pengumpulan data sebagai metode penelitian dilakukan dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku literatur Seperti surat kabar atau berita yang ada di internet yang berhubungan tentang masalah kajian informasi mengenai kepercayaan masyarakat Islam terhadap partai politik. Berhubungan dengan masalah ini kita ketahui bahwa partai politik ini sendiri memiliki definisi yang sangat luas dan tidak sederhana dalam mengartikan arti dari partai politik. Partai politik adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah bangsa dimana partai politik ini dipandang sebagai salah satu cara individu atau kelompok dalam mencapai kekuasaannya dan masyarakat umum menganggap bahwa partai politik merupakan salah satu wadah dalam menampung pendapat atau aspirasi dari masyarakat yang nantinya sebagai bentuk dalam pengambilan keputusan secara bersama adil dan juga merata.

Urgensi dari partai politik juga memiliki pandangan terhadap pengaruh ajaran Islam itu sendiri yaitu menjalankan suatu ajaran Islam dengan mengetahui bahwa undang-undang buatan manusia itu kurang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah di samping adanya budaya dan juga hukum barat yang berpandangan pada suatu penilaian yang tidak membawa pada kebahagiaan yang Hakiki dari dasar utama. Hak utama dari politik itu sendiri bahwa setiap warga negara dalam suatu negara harus bersumber dari dua alasan, yang pertama, Islam tidak membenarkan sebuah negara yang berdasar pengaruh atau penguasaan seorang individu atau satu pihak lain dan yang kedua bertanggung jawab untuk bersedia melaksanakan undang-undang syariah dalam setiap aspek kehidupan bagaimanapun juga umat tidak boleh melaksanakan suatu kedaulatan secara langsung maka dari itu ada suatu teori perwakilan sebagai wadah bagi politik umat Karena pada dasarnya kedaulatan yang Hakiki terletak pada rakyat itu sendiri. Jika kita ketahui ternyata warga islam yang ada di dunia sebagian besar bukanlah dari bangsa Arab tetapi dari aslinya dan juga Afrika. Hanya sekitar seperlima yang yang berasal dari bangsa arab.

Indonesia sendiri menempati posisi pertama dalam populasi terbesar di dunia warga negara islam tetapi Meskipun begitu Indonesia memiliki partai politik yang berasaskan Islam selalu kalah bertarung politik di Indonesia sekalipun Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Partai politik merupakan wadah organisasi yang di mana mereka bisa menyatukan semua orang-orang yang memiliki pemikiran yang berbeda menjadi satu pemikiran yang sama Sesuai dengan keputusan yang ada dari pemikiran dan orientasi mereka juga bisa dikonsolidasikan sedangkan secara umum partai politik dikatakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya sendiri mempunyai orientasi atau nilai dan cita-cita yang sama.

Menurut Edmund Burke dikutip oleh Katz dan crotty (dalam Efriza, 2019:20) mengatakan bahwa, partai politik adalah sekumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka, berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakati". Sedangkan menurut Giovanni sartori (dalam Efriza, 2019) mengatakan bahwa, partai politik adalah suatu kelompok poitik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu

menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Tujuan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan biasanya merebut kedudukan politik juga dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Dalam sejarah pemilu demokratis di Indonesia kekuatan partai-partai yang berasaskan Islam tidak pernah menjadi kekuatan mayoritas meskipun hampir 90% pemilihan Indonesia adalah warga negara beragama Islam. Hal ini terbukti pada pemilu 1955 dimana partai Islam seperti (Masyumi, NU, Perti dan PSII) hanya mampu meraih suara sekitar 43% dan ketika pada tahun 1999 dan 2004 Pemilu memiliki kekuatan penuh dari partai-partai Islam sekitar 38% saja. Kekalahan partai yang berasaskan Islam dalam pemilihan pada tanggal 7 Juni 1999 benar-benar telah artinya pada saat itu partai PPP atau Persatuan Pembangunan hanya meraih suara dan masuk 5 besar. Perolehan partai PBB jauh dibawah perkiraan meskipun berhasil membentuk fraksi sendiri di DPR dengan 13 anggotanya.

Selain itu ada Partai Keadilan atau PK yang hanya mendapatkan 7 kursi di DPR rumah dan gagal memenuhi ketentuan perolehan minimal 2% dari total untuk Pemilu tahun 2004. Hasil pemilu di Indonesia juga merupakan sinyal yang sangat jelas bahwa mayoritas Islam sudah tidak lagi menganggap penting simbol Islam dalam politik dan lebih pada substansi artinya jika memang demikian ini memungkinkan adanya pergeseran budaya politik dan partisipasi politik dalam masyarakat muslim itu sendiri titik dalam sebuah data ditemukan juga bahwa sikap masyarakat dari jumlah sampel yang diambil sebanyak 85% responden hasil dari masyarakat yang bersikap positif terhadap partai politik Islam hanya sebesar 48% maka dari itu masyarakat yang bersikap biasa sebesar 36% sedangkan yang bersikap negatif terhadap partai politik Islam sebanyak 15% yang tersebar di 4 dimensi yang diuji antara lain seperti dimensi tokoh atau kader ideologi atau platform program kerja dan juga Citra partai titik dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang bersikap positif terhadap partai politik tetapi dalam pemilihan legislatif nya masyarakat lain kurang berminat dalam memilih partai politik Islam.

Pada kesimpulannya data ini mengungkapkan bahwa alasan dari masyarakat tidak memilih partai politik Islam adalah partai politik Islam memiliki citra yang kurang baik dan masyarakat hendaknya tidak mudah mempercayai sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya sedangkan dari partai politik Islam sendiri agar lebih bisa bersosialisasi dan merangkul masyarakat agar masyarakat lebih mengenal partai politik Islam dan juga lebih mempercayai partai politik di Indonesia dengan lebih baik dan sesuai dengan semestinya. Adanya partai politik ini kita bisa mengetahui bahwa di dalam politik banyak berpendapat bahwa rakyat itu harus ikut serta dalam proses politik dengan adanya keikutsertaan masyarakat ke politik maka muncul partai politik dengan adanya partai politik ini maka akan berkembang dan juga padat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan.

Menurut Alexandra cole (dalam Efriza, 2019:20) pembentukan partai politik pada umumnya dikaitkan dengan upaya memperluas kepentingan dan pemerintahan representatif. Partisipasi politik yang merupakan salah satu dari jumlah istilah yang

mempunyai banyak arti sehingga istilah itu pun pada akhirnya kehilangan kegunaannya. Partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik yang dimana negara-negara menganut paham demokrasi menggagaskan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak menentukan siapa-siapa yang menjadi pemimpin yang nantinya Menentukan kebijakan umum dari suatu negara tersebut. Bahkan menurut Haryadi dalam (detik suarabaya.com pada tanggal 3/6/2010) tingginya angkot Golput mencapai 60% dalam pilwali Surabaya menunjukkan peraturan KPU kurang tegas.

Diketahui hasil penelitian yang dilakukan oleh Centre of strategic and international studies atau CSIS yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini mungkin sangat rendah yaitu hanya sekitaran 22,4% saja dan responden menilai partai politik memiliki kerja yang baik dan sisanya menilai sebaliknya. Dukungan yang dihadapkan terhadap partai politik turun dibandingkan dengan Pemilu pada tahun 2009. Hal ini karena saat partai politik bukan menjadi institusi yang menjadi saluran aspirasi masyarakat ke pemerintah Tetapi lebih ke partai politik yang menjadi alat atau au main politik saja untuk mencapai kekuasaan dan juga penguasaan sumber daya alam yang ada.

Selain itu KPU dinilai kurang optimal dan juga meyakinkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Angka suara yang didapat oleh masyarakat Surabaya sekitar 60% atau kurang lebih dibandingkan pilwali pada tahun 2005 dan bahkan pada pemilihan Gubernur Jawa Timur sampai ke pemilihan presiden di dalam konteks kecenderungan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu selanjutnya juga dapat dipahami argumentasinya yaitu sebagai kritik ataupun kondisi politik yang ada titik sikap anti masyarakat terhadap partai politik merupakan wujud masyarakat atau rakyat masih bersikap kritis dan juga mekanisme kontrol yang masih terus berjalan titik tingkat dari sebuah kemajuan untuk melihat dan juga mengkoreksi partai politik yang di mana memburuknya penilaian publik terhadap partai politik tidak lepas dari perilaku ataupun oknum dari partai politik itu sendiri.

Jika kepercayaan kepada partai politik juga semakin luntur terus-menerus maka akan rusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia selama ini. Prediksi pada Pemilu pada tahun 2014 juga menghasilkan survei dari CSIS yang menyatakan bahwa akan semakin banyak pemilihan golongan putih atau Golput karena tidak kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Jika kita lihat dari demokrasi ini akan menjadi hal yang sangat dipertanyakan. Bagaimana mau memperkuat demokrasi kalau orang yang punya hak politisi Tidak mau menggunakan haknya itu dengan benar dan sungguh-sungguh. Sebuah negara juga tidak bisa hidup tanpa partai politik maka dari itu partai politik harus berani membelah diri atau memprogramkan sehingga munculnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan adanya ke penguatan terhadap partai politik karena partai politik ini adalah sangat penting sebagai pilar demokrasi Indonesia.

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput diperlukan langkah-langkah atau preventif nyata dari pemerintahan itu sendiri seperti fenomena penurunan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap partai politik harus segera diatasi titik partai politik juga harus segera kembali pada fungsi awalnya gimana partai politik yang pada kodratnya sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintahan dalam menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat terhadap politik dan pemilihan untuk keberlangsungannya kepemimpinan yang ada di Indonesia ini bukan hanya sekedar alat atau permainan oleh atau oknum politik dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat hanya untuk kekuasaan tetapi juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai mana mestinya untuk itu partai politik perlu melaksanakan fungsinya dengan benar dan juga tepat. Maka dari itu kita harus bisa mulai menggeser paradigma masyarakat terhadap partisipasi politik dalam konteks demokrasi yang mutlak diperlukan agar Pemilu mendatang tidak ada lagi demokrasi yang hanya prosedur semata dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik Islam yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari uraian, penjelasan dan analisa penulis tentang tingkat Kepercayaan Masyarakat Muslim Terhadap Partai Politik Berasas Islam maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat tingkat kepuasan dan preferensi pilihan Masyarakat Muslim terhadap partai politik berasas Islam rendah (14%) dan belum mampu mengalahkan keunggulan dari kepercayaan Masyarakat Muslim terhadap partai politik berbasis masa Islam (23%) dan di luar keduanya (41%) yang disebabkan karena partai politik berasas Islam belum mampu mewakili aspirasi masyarakat.
2. Tingkat efektifitas partai politik dalam mempengaruhi partisipasi politik buruk, yaitu sebanyak 70% masih menganggap partai politik belum efektif dalam mewujudkan program-program yang telah disusun sesuai dengan ideologi partai politiknya masing-masing.
3. Perilaku masyarakat muslim dalam mengakses informasi politik berdasarkan temuan penulis dapat disimpulkan bahwa, masyarakat mayoritas mengakses informasi politik melalui pemberitaan media elektronik televisi (62%).

DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid, F. A. (2008). POLITIK ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 9(2), 75-86.
- Abdurrofiq, A. Tingkat kepercayaan masyarakat muslim terhadap partai politik berasas islam: studi kasus di Kecamatan Kebumen pada pemilu 2014.
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17-38.
- Yuliono, A. (2013). Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik (DIA)*, 11(1), 173-184.